

ABSTRAK

Kabupaten Pematang Jaya dewasa ini memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap Notaris, dikarenakan masyarakatnya yang mulai sadar terhadap pentingnya pencatatan hukum. Peningkatan ini beriringan dengan pentingnya penyimpanan minuta akta oleh Notaris.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui: 1). Penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pematang Jaya. 2) Hambatan serta solusi dalam menegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pematang Jaya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data utama. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif analitik.

Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1). Penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pematang Jaya yaitu dimulai dengan pengajuan Laporan, pemanggilan dan pemeriksaan oleh MPD, serta pelaksanaan sidang oleh MPW. Sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebagaimana diatur dalam Pasal 85, sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi terberat yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris. 2) Hambatan dalam menegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pematang Jaya yaitu Majelis Pengawas Daerah notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan atas laporan masyarakat, adanya pembatasan waktu yang sangat singkat dari mulai diterimanya laporan sampai dengan menyelesaikan pemeriksaan dengan anggota majelis pengawas notaris, Kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris, Pengetahuan masyarakat yang kurang Solusi yang dapat dilakukan yaitu Majelis Pengawas Daerah diharuskan sesegera mungkin membuat berita acara dan segera dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah agar segera dapat di proses, membuat dan segera mengatur jadwal kepada 3 (tiga) unsur anggota Majelis Pengawas, merencanakan visi saat ini dan untuk kedepan nanti untuk melakukan tugas pengawasan dan meningkatkan kinerja, memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Kementerian Hukum dan Ham dan penyuluhan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Akta Notaris, Sanksi Notaris

ABSTRACT

Pemalang Regency today has a high level of need for Notaries, because its people are starting to realize the importance of legal registration. This increase is in line with the importance of keeping the minutes of deed by the Notary.

The purpose of this research is to analyze and find out:

1). Law enforcement against a notary who neglects to keep the minutes of deed in Pemalang Regency. 2) Obstacles and solutions in enforcing the law against a notary who neglects to keep the minutes of deed in Pemalang Regency.

The approach method in this research is empirical juridical with the help of primary data or empirical data as the main data. The data used are primary and secondary data obtained through interviews and literature study, data analysis was carried out by analytical descriptive.

The results of the research concluded: 1). Law enforcement against a notary who neglects to keep the minutes of deed in Pemalang Regency, namely starting with the submission of a report, summons and examination by the MPD, as well as the conduct of a trial by the MPW. Sanctions against a Notary who is proven to have violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter b, as regulated in Article 85, the sanctions are in the form of verbal warning, written warning, temporary dismissal, honorable discharge and dishonorable dismissal. the toughest sanctions imposed on notaries who violate the code of ethics and the Law on Notary Positions. 2) Obstacles in enforcing the law against notaries who neglect to keep the minutes of deed in Pemalang Regency, namely the Regional Supervisory Council of the notary does not have the authority to make decisions on public reports, there is a very short time limit from receiving the report to completing the examination with members of the assembly. Notary supervisor, Lack of vision to carry out the supervisory function to Notaries, Lack of public knowledge The solution that can be done is that the Regional Supervisory Council is required to immediately make an official report and immediately send it to the Regional Supervisory Council so that it can be processed immediately, make and immediately arrange a schedule for 3 (three) members of the Supervisory Council, planning the current and future vision to carry out supervisory duties and improve performance, provide socialization and appeal to the community from the Regional Supervisory Council, Regional Supervisory Council h, Ministry of Law and Human Rights and legal counseling.

Keywords: Law Enforcement, Notary Deed, Notary Sanctions